

Model Dinamika Sosio Ekonomi Ibnu Khaldun: Korupsi sebagai Determinan Kemiskinan di Pulau Jawa

Siti Nur Latifah

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

E-mail: latifahsitinur516@gmail.com

Abstract

In Islamic history, one of the scholars who discussed the problem of poverty was Ibnu Khaldun. In his analysis, the phenomenon of the rise and fall of a civilization is not only caused by economic variables, but also by a number of non-economic factors. Therefore, in his book entitled "Muqaddimah", he tries to determine interrelated factors such as the role of moral, psychological, political, economic, social and demographic factors. Ibnu Khaldun's explanation shows that poverty is a classic problem and has broad and complex dimensions, so that policy strategies in efforts to eradicate it cannot have one role. Ibn Khaldun's social dynamics model, which is still abstract, is then proxied into several economic and non-economic variables. Some of these variables are poverty level, Government Expenditures (in the field of social protection), Corruption Crimes, Human Development Index (HDI), Gross Regional Domestic Product (GRDP), Government Investment and Gini Ratio. Sharia parameters are one of the non-economic parameters (moral approach) that are interesting and differentiate between Ibn Khaldun's social dynamics model and the poverty measurement model that has been widely used by researchers. The aim of this research is that with Ibnu Khaldun's dynamic model approach, it is hoped that it will be able to provide solutions in terms of alleviating poverty in various regions, including the island of Java. The data used in this research is panel data, which is a combination of cross-section and time-series data. The panel data in this research uses 6 provinces starting from 2018-2022 using the Panel Data Regression method. The research results show that Government Expenditures (in the field of social protection), Human Development Index (HDI), Gross Regional Domestic Product (GRDP), Government Investment and the Gini Ratio have a significant effect on the number of poor people on the island of Java. Meanwhile, the number of corruption cases has an insignificant effect on the number of poor people on the island of Java.

Keywords; Ibn Khaldun's Dynamic Model, Morality Approach, Poverty, Panel Data Regression



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Topik kemiskinan sangat kompleks dan beragam. Ada berbagai perspektif tentang bagaimana kemiskinan itu muncul dan bertahan selama berabad-abad. Diskusi tentang kemiskinan dan pemberantasannya telah berlangsung lama. Ada beberapa pendekatan untuk memahami fenomena ini. Pendekatan ini dapat bersifat individual atau struktural. Kemiskinan bukan hanya konsep ekonomi tetapi juga politik. Banyak aktor negara maupun nonnegara yang terlibat dalam keberlangsungannya, yang memiliki berbagai dinamika. Apakah mereka yang hidup dalam kemiskinan semata-mata bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri atau kemiskinan disebabkan oleh masalah sistemik dan mengapa ketimpangan meningkat seiring dengan tingkat pembangunan suatu negara. (Daas, 2019: 2).

Di dalam sejarah Islam, salah satu ulama yang mengulas masalah kemiskinan adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lebih dari 600 tahun yang lalu menjelaskan penyebab kemunduran umat Islam yang telah terjadi selama masa hidupnya. Meskipun sebagian besar dari apa yang Ibnu Khaldun tulis telah menjadi bagian dari kearifan konvensional saat ini (Chapra, 2008:837). Mengingat pusat dari analisis Ibnu Khaldun adalah manusia (Rosenthal, 1967), ia memandang jatuh dan banggunya suatu dinasti atau peradaban sangat bergantung pada kesejahteraan atau kesulitan hidup manusia. Dalam analisisnya, fenomena jatuh dan banggunya suatu peradaban tidak saja disebabkan oleh variabel ekonomi saja, melainkan juga pada sejumlah faktor nonekonomi. Oleh karena itu, dalam kitabnya yang berjudul “Muqaddimah”. ia mencoba menentukan faktor-faktor yang saling berhubungan seperti peran faktor moral, psikologis, politik, ekonomi, sosial dan demografi (Chapra, 2000:146–147).

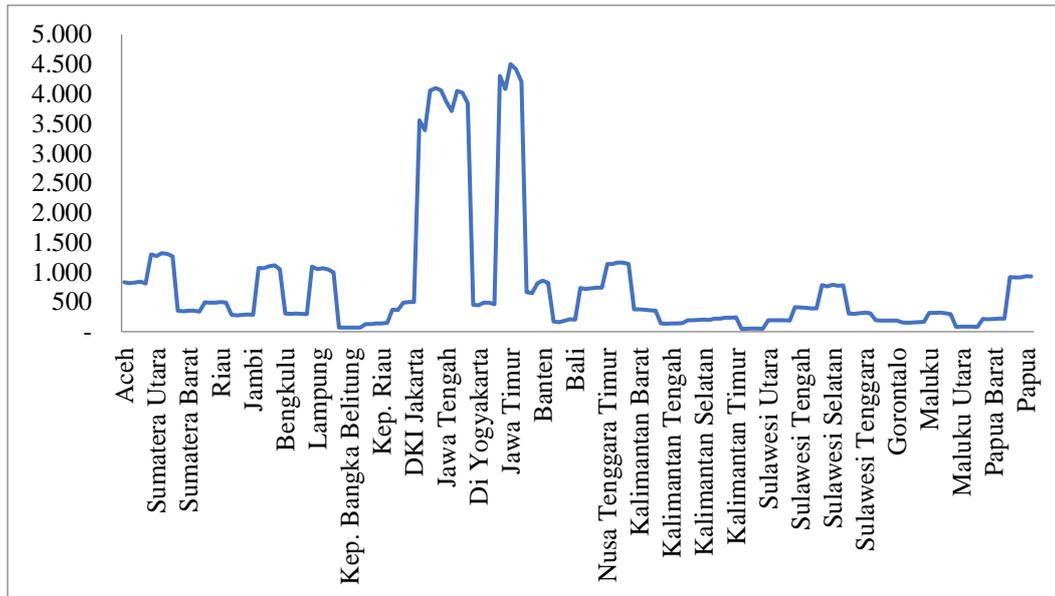
Keseluruhan model Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah, terdapat dalam kalimat nasihatnya pada seorang raja (penguasa) yaitu:

أَيُّهَا الْمَلِكُ، إِنَّ الْمُلْكَ لَا يَتِمُّ عِزُّهُ إِلَّا بِالشَّرِيعَةِ، وَالْقِيَامِ لِلَّهِ بِطَاعَتِهِ، وَالتَّصَرُّفِ تَحْتَهُ أَمْرُهُ وَهَيْبُهُ، وَلَا قَوَامَ لِالشَّرِيعَةِ إِلَّا بِالْمَلِكِ، وَلَا عِزٌّ لِلْمَلِكِ إِلَّا بِالرِّجَالِ، وَلَا قَوَامَ بِالرِّجَالِ إِلَّا بِالْمَالِ، وَلَا سَبِيلَ لِلْمَالِ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ، وَلَا سَبِيلَ لِلْعِمَارَةِ إِلَّا بِالْعَدْلِ. وَالْعَدْلُ الْمِيزَانُ الْمَنْصُوبُ بَيْنَ الخَلِيقَةِ، نَصَبَهُ الرَّبُّ وَجَعَلَ لَهُ قِيَمًا، وَهُوَ الْمَلِكُ.

Artinya: Wahai Raja, sesungguhnya kerajaan itu tidak dapat sempurna kecuali dengan syariat. yaitu bekerja demi Allah dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. dan syariat tidak akan tegak kecuali dengan Raja. Tidak ada kemuliaaan bagi raja kecuali dengan tokoh-tokoh. Tiada tegak bagi tokoh-tokoh kecuali dengan harta. Tiada jalan kepada harta kecuali dengan pembangunan. Tiada pembangunan kecuali dengan keadilan. Keadilan adalah merupakan timbangan antar makhluk yang dipasang oleh Tuhan. dan untuknya diciptakanlah seorang penjaga. Rajalah penjaga itu” (Ibnu Khaldun, 1978: 366).

Kalimat nasihat ini terdiri dari delapan prinsip dari kebijakan politik Ibnu Khaldun. Delapan kalimat ini disebut “Eight Wise Principles” atau delapan prinsip (kalimat Hikammiah). Masing-masing faktor berhubungan satu sama lain secara sama dalam sebuah alur daur dimana permulaan dan akhir tidak dapat dibedakan (Chapra, 2000: 148).

Penjelasan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah klasik dan memiliki dimensi yang luas dan kompleks, sehingga strategi kebijakan dalam upaya pemberantasannya tidak dapat menjadi satu peran. Pendekatan model dinamika Ibnu Khaldun diharapkan mampu memberi solusi dalam hal pengentasan kemiskinan diberbagai negara, khususnya di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yaitu Indonesia. Adapun grafik jumlah penduduk miskin di Indonesia 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Line Plot Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Juta Jiwa), 2018-2022
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) RI, 2024

Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan jumlah penduduk miskin yang tidak merata. Selama 5 tahun terakhir, dihitung sejak tahun 2018-2022. Jumlah penduduk miskin terkonsentrasi di pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur). Hal ini disebabkan pulau Jawa selain sebagai lokasi pusat pemerintahan, juga sebagai pusat perekonomian dimana sektor industri dan jasa berkembang pesat terutama dikawasan industri seperti jabodetabek. Akibatnya terjadi mobilisasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara besar besaran dari luar Jawa ke Jawa. Adapun provinsi di pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi yakni di provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,502.54 juta jiwa.

Adapun penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Timur disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar, namun tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk dan peningkatan kesempatan kerja (BPS Jawa Timur, 2021). Selama ini mayoritas penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurut data sensus BPS 2020, 56,10% dari total penduduk Indonesia tinggal di Jawa, dimana 26,11% tinggal di Jawa Timur. Kenaikan harga bahan pokok akibat kelangkaan sembako pada pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan di Jawa Timur. Akibatnya terjadi ketimpangan distribusi, kesenjangan pembangunan dan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

Banyak penelitian telah dilakukan guna memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di banyak negara, terutama negara berkembang. Secara umum kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu ekonomi modern. Penelitian yang pernah dilakukan oleh (dankumo et al., 2019; Salahuddin et al., 2020) menyatakan bahwa Indeks persepsi

korupsi merupakan salah satu parameter yang mampu meningkatkan jumlah kemiskinan. Penelitian terkait IPM sebagai parameter kemiskinan pernah dilakukan oleh (Cahyadi & Cen, 2020; Fahrika et al., 2020; Hasan, 2021) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh (Hasan, 2021; Rochman & Sylviana, 2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi PDB maka mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Selain PDB, investasi pemerintah dibebberapa penelitian seperti yang pernah dilakukan oleh (Ahmad et al., 2019; Budi Setiawan & Adzim, 2018; Dhahri & Omri, 2020; Fahrika et al., 2020; Luthfi et al., 2018; Rochman & Sylviana, 2020) meunjukkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menggunakan variabel secara kompleks dengan merujuk pada variabel penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya terbatas pada variabel-variabel ekonomi saja dalam menentukan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Akan tetapi pada penelitian ini, peneliti mengembangkan penggunaan variabel baru pada model dinamika Ibnu khaldun yaitu variabel nonekonomi (Syariah/moralitas). Parameter Syariah merupakan salah satu parameter nonekonomi (pendekatan moral) yang menarik dan membedakan antara model dinamika sosio Ibnu Khaldun dengan model pengukuran kemiskinan yang selama ini banyak dilakukan oleh para peneliti.

METODE

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh provinsi yang berada di Jawa Timur yaitu 6 Provinsi, dengan waktu pengamatan selama kurun waktu 5 tahun (2018-2022). sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data statistik yang dipublish oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat diunduh melalui website www.bps.go.id. Selain itu data juga diperoleh dari Laporan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yang merupakan gabungan antara data crosssection dan time-series. Data panel dalam penelitian ini sebanyak $N=6$ provinsi dan $T=5$ tahun, maka diperoleh $N \times T= 30$. Sehingga jumlah observasi data panel menjadi 30 data pengamatan. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data panel. Tiga pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan model regresi data panel adalah Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Hill et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pendekatan model regresi data panel dengan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dan hasil uji pemilihan model terbaik dengan menggunakan Chow Test dan Lagrange Multiplier Test menunjukkan bahwa model regresi yang lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Adapun hasil uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Prob.	Keterangan
C	17848.25	0.0001	
EXPENDITURE	-5.14E-10	0.0948	Berpengaruh Signifikan
CORRUPTION	15.84527	0.2017	Berpengaruh tidak signifikan
IPM	-344.8967	0.0002	Berpengaruh Signifikan
PDRB	0.002005	0.0000	Berpengaruh Signifikan
INVESTMENT	-0.304279	0.0049	Berpengaruh Signifikan
GINI RATIO	22656.67	0.0111	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Output Eviews 9

Adapun hasil regresi data panel pada Tabel 1, dengan uji signifikansi secara parsial pada tingkat signifikansi sebesar 5% dan 10% dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Pengeluaran Pemerintah di Sektor Perlindungan Sosial (X_1) dengan nilai koefisien sebesar -5.14E-10 dan signifikansi probabilitas *p-value* sebesar $0.0948 < 0,1$ artinya secara parsial variabel X_1 (Pengeluaran Pemerintah di Sektor Perlindungan Sosial) **berpengaruh negatif dan signifikan** terhadap variabel Y (kemiskinan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah di bidang perlindungan sosial akan semakin menurunkan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengeluaran pemerintah dalam bidang perlindungan sosial, mampu untuk melindungi masyarakat dari resiko ekonomi dan sosial yang dapat menyebabkan kemiskinan. Anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai berbagai program perlindungan sosial seperti Pengeluaran Pemerintah untuk bantuan sosial telah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa.

Dalam teori pasar barang yang disampaikan oleh (Blanchard, 2013) bahwa ketika seseorang memiliki pendapatan dalam hal ini pendapatan karena bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam program perlindungan sosial, maka seseorang akan memiliki kemampuan membeli barang. Kemampuan membeli barang akan menimbulkan perubahan permintaan barang. Perubahan permintaan barang menimbulkan perubahan produksi. Perubahan produksi menimbulkan perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan

kembali menimbulkan perubahan permintaan barang karena kemampuan seseorang dalam membeli barang. Sehingga Pengeluaran Pemerintah untuk bantuan sosial baik bantuan tunai dan nontunai akan memiliki dampak *Multiplier Effect* tersebut. Jika dihubungkan dengan teori pasar barang tersebut, program pemberian bantuan sosial dalam jangka waktu pendek mampu menggerakkan perekonomian dan mampu menurunkan kemiskinan.

2. Variabel tindak Pidana korupsi (X_2) dengan nilai koefisien sebesar 15.84527 dan signifikansi probabilitas *p-value* sebesar $0.2017 > 0,1$, artinya secara parsial variabel X_2 (tindak Pidana korupsi) **berpengaruh positif dan tidak signifikan** terhadap variabel Y (kemiskinan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya Kasus Tindak Pidana Korupsi, maka akan menaikkan jumlah penduduk miskin. Akan tetapi hanya memberikan pengaruh kecil terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa.

Perilaku korupsi merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip keadilan, berdasarkan hasil dalam penelitian ini tindak Pidana korupsi sebagai perilaku yang dapat memproxy prinsip keadilan dalam Islam memiliki pengaruh langsung terhadap kemiskinan, meski dampaknya tidak cukup signifikan. Semakin tinggi tingkat korupsi di sebuah wilayah, maka akan menaikkan jumlah penduduk miskin. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh korupsi tidak secara langsung berdampak pada kemiskinan melainkan lebih mengarah pada inefisiensi proses produksi dan misalokasi sumber daya. Hal ini terjadi dikarenakan korupsi dapat menurunkan kualitas kelembagaan dan membuat kebocoran dalam pembiayaan sumber daya. Dalam hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pandangan Ibnu khaldun semakin bermoral sebuah wilayah maka akan berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.

3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_3) dengan nilai koefisien sebesar -344.8967 dan signifikansi probabilitas *p-value* sebesar $0.0002 < 0,05$, artinya secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_3) **berpengaruh negatif dan signifikan** terhadap variabel Y (kemiskinan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa.

Komposisi IPM berdasarkan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan akan menurunkan tingkat

kemiskinan. Di samping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap pertambahan pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan dan menurunnya tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.

4. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_4) dengan nilai koefisien sebesar 0.002005 dan signifikansi probabilitas *p-value* sebesar $0.0000 < 0,05$, artinya secara parsial variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_4) **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap variabel Y (kemiskinan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), justru akan menaikkan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa.

Beberapa penyebab dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, antara lain karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan/*inequality*. Studi yang dilakukan oleh Kuznet (1995) yang menyampaikan bahwa proses Pembangunan akan disertai peningkatan *inequality* secara substansial, kemudian akan mengalami *turning point* pada saat perekonomian telah maju (advanced). Keadaan ini juga disampaikan oleh Ahluwalia et al (1979) yang juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan *inequality* menyebabkan masyarakat miskin akan mendapat bagian yang kecil dari pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian ini dan bukti-bukti penelitian yang ada bahwa pertumbuhan ekonomi atau terdapatnya pertumbuhan dalam PDRB tidak dapat secara langsung dapat mengurangi kemiskinan, seringkali terdapat *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Karena dalam pertumbuhan ekonomi memang disertai terjadinya *inequality* dan terdapat peningkatan pendapatan penduduk miskin akan tetapi dengan *rate* yang lebih lambat dari rata-rata peningkatan pendapatan.

5. Variabel Investasi pemerintah (X_5) dengan nilai koefisien sebesar -0.304279 dan signifikansi probabilitas *p-value* sebesar $0.0049 > 0,05$ artinya secara parsial variabel Investasi pemerintah (X_5) **berpengaruh negatif dan signifikan** terhadap variabel Y (kemiskinan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya investasi pemerintah, maka akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa.

Secara teoritis hasil dalam penelitian ini mengkonfirmasi cara berpikir ekonomi neoklasik, dimana kegiatan perekonomian digerakkan oleh dua sumbu yaitu investasi dan tabungan. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi jika terdapat investasi, karena dalam investasi

akan menciptakan permintaan tenaga kerja dan dari posisi ini akan tercipta daya beli masyarakat karena terdapatnya tingkat gaji yang diterima oleh pekerja (*demand side*) dan berikutnya melalui investasi akan menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual ke pasar dan hal ini menjadi dasar dari pendapatan/pertumbuhan ekonomi (*supply side*) (Yustika, 2020). Berdasarkan cara berfikir teoritis tersebut maka dapat disimpulkan dengan semakin meningkatnya investasi di Pulau Jawa maka akan semakin menurunkan jumlah penduduk miskin akibat dari dampak positif investasi tersebut terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

6. Variabel Gini Rasio (X_6) dengan nilai koefisien sebesar 22656.67 Dengan nilai signifikansi probabilitas *p-value* sebesar $0.0111 < 0,05$, artinya secara parsial variabel Gini Rasio (X_6) **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap variabel Y (kemiskinan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ketimpangan (*Gini Ratio*), maka akan menaikkan jumlah penduduk di Pulau Jawa.

Menurut Ibnu Khaldun, Salah satu faktor penting kuatnya permintaan dan penawaran adalah tingkat pendapatan masyarakat. Untuk itu, bagi Ibnu Khaldun pendapatan masyarakat perlu didistribusikan secara adil dan merata. Sistem distribusi pendapatan paling tidak terdapat pada 3 elemen yaitu gaji, laba dan pajak. Maka menjadi penting bagi pemerintah di wilayah pulau Jawa untuk meminimalisir tingkat ketimpangan dengan cara mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka menjadi penting bagi pemerintah dalam melihat faktor-faktor terkait penyebab terjadinya kemiskinan tidak lagi hanya berfokus pada faktor-faktor ekonomi saja, akan tetapi juga pada faktor-faktor non-ekonomi seperti faktor moralitas. Pentingnya moralitas dalam pemerintahan menjadi Kunci keberhasilan pembangunan dalam sebuah wilayah khususnya di Pulau Jawa. Peningkatan pengeluaran pemerintah, IPM, PDRB dan investasi saja mungkin tidak cukup. Penting juga untuk meningkatkan kualitas moral individu, yang umumnya cenderung diabaikan oleh ekonomi neoklasik.

REFERENSI

- Ahmad, F., Draz, M. U., Su, L., Ozturk, I., Rauf, A., & Ali, S. (2019). Impact of FDI inflows on poverty reduction in the ASEAN and SAARC economies. *Sustainability (Switzerland)*, 11(9), 2565. <https://doi.org/10.3390/su11092565>

- Blanchard, O. (2013). *Macroeconomics* (6th Editio). Pearson Education.
- Budi Setiawan, A., & Adzim, F. (2018). Determinant of Poverty in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 6(1), 22–29. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i1.22197>
- Cahyadi, W., & Cen, C. C. (2020). The effect of income distribution, human development index, and economic growth on poverty. *International Journal of Economic and Business Applied*, 1(2), 187–194.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foudation.
- Chapra, M. U. (2008). Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world? *Journal of Socio-Economics*, 37(2), 836–863. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2006.12.051>
- Daas, Y. (2019). *Poverty : A Structural Perspective*. August 2018.
- Dankumo, A. M., Ishak, S., Bani, Y., & Hamza, H. Z. (2019). The Relationship between Public Expenditure, Corruption and Poverty in Nigeria. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 11(1), 2019. <https://doi.org/10.17977/um002v11i12019p076>
- Dahri, S., & Omri, A. (2020). Foreign capital towards SDGs 1 & 2—Ending Poverty and hunger: The role of agricultural production. *Structural Change and Economic Dynamics*, 53, 208–221. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.02.004>
- Fahrika, A. I., Salam, H., & Buhasyim, M. A. (2020). Effect of Human Development Index (HDI), Unemployment, and Investment Realization toward Poverty in South Sulawesi-Indonesia. *The International Journal of Social Sciences World (TIJOSSW)*, 2(2), 110–116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4080749>
- Hasan, Z. (2021). The Effect Of Economic Growth And Human Development Index On Poverty In Indonesia. *Journal Of Economics And Sustainability*, 3(Number 1), 42–53. <https://doi.org/10.32890/jes2021.3.1.5>
- Hill, R. C., Griffiths, W. E., & Lim, G. C. (2018). *Principles of econometrics*.
- Ibn Khaldun, A. A. R. bin M. (1978). *Muqaddimah* (Abridged E). Routledge & Kegan.
- Luthfi, M. Y., Hamzah, M. Z., & Izazi, S. A. (2018). *Determinant Factors of Percapita Income and Poverty Level in the Eastern Indonesia Period Year 2004 – 2016*. <https://papers.ssrn.com/abstract=3340668>
- Rochman, F., & Sylviana, W. (2020). Analysis of Foreign Direct Investment (FDI) impact on poverty in Indonesia 2010 until 2014. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt*, 17(3).
- Rosenthal, F. (1967). *Ibn Khaldun: An Introduction to History-The Muqaddimah*.
- Salahuddin, M., Vink, N., Ralph, N., & Gow, J. (2020). Globalisation, poverty and corruption:

Retarding progress in South Africa. *Development Southern Africa*, 37(4), 617–643.
<https://doi.org/10.1080/0376835X.2019.1678460>

Yustika, A. E. (2020). *Ekonomi Politik: Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris*. Intrans Publishing.